

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi terutama teknologi informasi telah ikut mempengaruhi perkembangan akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan berkembangnya sistem informasi akuntansi yang semakin cepat sehingga tujuan akuntansi dalam menyampaikan informasi ekonomi atau keuangan semakin cepat. Disisi lain juga perkembangan teknologi tersebut berdampak pada semakin memudahkan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Kecurangan tersebut terjadi dalam berbagai bentuk mulai dari merekayasa laporan akuntansi menjadi bagus (*windows dressing*) sampai dengan tindakan-tindakan kecurangan lainnya yang mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan faktanya. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu yang dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) juga membagi kecurangan (*fraud*) dalam tiga jenis berdasarkan perbuatan, yaitu: *Asset Misappropriation* (penyalahgunaan aset), *Fraudulent Statements* (kecurangan laporan keuangan), dan *Corruption* (korupsi).

Kecurangan dalam laporan keuangan meliputi salah saji atau penghapusan terhadap jumlah atau pun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menipu para penggunanya, sedangkan istilah penyalahgunaan aset sering kali digunakan untuk mengacu pada pencurian yang dilakukan oleh pegawai dan pihak-pihak internal lainnya di dalam suatu organisasi. Korupsi dinilai sebagai jenis kecurangan yang paling sulit untuk dicegah karena adanya kerja sama yang dilakukan oleh pihak dalam maupun luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan.

Pencegahan kecurangan laporan keuangan di pemerintahan dapat dilakukan dengan melakukan pelaksanaan SOP yang dapat menjamin instansi pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan. Penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku. Ada beberapa cara untuk mencegah kecurangan laporan keuangan, yaitu dibutuhkan integritas seorang auditor, komitmen organisasi, dan penerapan *good corporate governance* di instansi tempat pegawai itu bekerja.

Faktor penting dalam pencegahan kecurangan laporan keuangan adalah seorang auditor harus memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor saat sedang menjalankan tugasnya diatur oleh kode etik yang dikenal dengan Kode Etik Akuntan Indonesia. Pasal 1 ayat 2 Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan

integritas, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Akuntan yang mempunyai integritas tidak mudah tergoda oleh bujukan dan rayuan yang akan mengganggu keutuhan dirinya. Seorang akuntan yang memiliki integritas akan selalu memilihat segala hal sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Seorang anggota auditor harus dapat mempertahankan sikap integritasnya, dimana auditor itu harus memiliki sikap yang jujur, transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit sehingga hasil auditnya akan dipercaya oleh masyarakat.

Faktor lain untuk mencegah kecurangan laporan keuangan adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi sebagai kekuatan pengikat yang menginspirasi individu dan menghubungkan mereka ke organisasi, membuat mereka mengejar tindakan tertentu, dan memunculkan nilai perilaku bagi organisasi. Komitmen di pandang sebagai suatu orientasi nilai terhadap organisasi yang menunjukkan sifat individu sangat memikirkan dan mengutamakan pekerjaan serta organisasinya. Karyawan yang berkomitmen pada organisasi memiliki keinginan kuat serta bekerja keras pada organisasi itu sendiri dengan kata lain ini merupakan loyalitas yang diberikan oleh karyawan terhadap organisasi.

Faktor selanjutnya untuk mencegah kecurangan laporan keuangan ialah penerapan *good corporate governance* di instansi tersebut. Secara umum *Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi. *Good corporate governance* merujuk pada aturan dan proses pengendalian instansi pemerintahan. Suatu instansi

pemerintah dikatakan memiliki tata kelola yang baik jika instansi pemerintahan tersebut dapat melakukan transparansi. *Good corporate governance* bagi instansi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan dan menerapkan efektivitas serta efisiensi dalam menangani permasalahan kecurangan laporan keuangan. Instansi membutuhkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terutama terkait dengan manajemen internal instansi yang bersangkutan.

Terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan biasanya dilakukan oleh oknum dalam organisasi atau pihak yang memiliki hubungan kerja dengan organisasi. Instansi pemerintahan dapat menghindari terjadinya kecurangan laporan keuangan dengan adanya integritas auditor, komitmen organisasi dari sumber daya manusianya, dan penerapan *good corporate governance*.

## **1.2 Fenomena Penelitian**

Kejadian tentang kecurangan laporan keuangan yang terjadi di Indonesia salah satunya yang terjadi pada dalam pemberian bansos tahap 1 terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bansos tersebut. Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik sejak 29 April 2020 telah membuka pengaduan khusus terkait permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik selama pandemi. Per 3 Juni 2020 tercatat sekitar 1.004 laporan terkait masalah pelayanan publik selama pandemi dan sekitar 81,37% atau sekitar 817 laporan merupakan laporan berkaitan dengan permasalahan penyaluran bansos. Ombudsman RI juga menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bansos adalah

penyaluran yang tidak merata baik dalam hal waktu hingga sasaran masyarakat penerima bansos. Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 102 kasus dugaan penyelewengan dana bansos di seluruh Indonesia. Adapun pelaku penyelewengan tersebut yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan berasal dari pejabat publik mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyaluran bansos oleh pemerintah saat ini terdapat sejumlah permasalahan yang menyertainya. Pada hakikatnya dalam penyaluran bansos diperlukan suatu sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pentingnya suatu sistem pengawasan dalam penyaluran dana bansos tentunya tidak dapat dilepaskan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelayanan publik oleh negara. Secara yuridis definisi asas keterbukaan dan akuntabilitas termaktub dalam Pasal 4 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut Undang-Undang ini asas keterbukaan diartikan bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Sedangkan asas akuntabilitas diartikan sebagai proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009).

### **1.3 GAP Penelitian Sebelumnya**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alias *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa objektivitas dan integritas auditor yang tinggi berpengaruh positif ketika

dihadapkan selama penugasan audit dan mendeteksi perilaku tidak etis (kecurangan), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hanim *et al.*, (2017) menemukan bahwa ada hubungan negatif signifikan antara integritas auditor dan kecurangan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kim *et al.*, (2017), penelitian juga menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dalam mencegah kecurangan laporan keuangan, tetapi hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Caillier (2016) yang hasilnya menunjukkan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan.

Penelitian yang dilakukan oleh Halbouni *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa tata kelola yang baik & teknologi informasi memiliki pengaruh atas peran terhadap pencegahan kecurangan, sedangkan hasil yang bertolak belakang menurut penelitian dari Birol B. (2019) menunjukkan tata kelola yang baik berpengaruh negatif untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian, maka penulis tertarik untuk mengkaji ulang penelitian terkait integritas auditor, komitmen organisasi dan *good corporate governance* dalam kaitan terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan. Penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Integritas Auditor, Komitmen Organisasi dan Penerapan *Good Corporate Governance* Pengaruhnya Terhadap Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Wilayah Kota Bekasi)”**

## 1.4. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

### 1.4.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Integritas Auditor adalah menjaga, memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, dimana seorang auditor harus selalu bersikap jujur dan berterus terang, bertanggungjawab bebas dari benturan kepentingan, tegas, mempunyai dedikasi yang tinggi dan dapat dipercaya serta tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambil keputusan yang berkualitas.
2. Komitmen Organisasi adalah sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikan hubungan karyawan dengan organisasi atau impiaknya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi atau tidak.
3. *Good Corporate Governance* merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh pemerintah untuk memaksimalkan nilai pemerintah, meningkatkan kinerja dan kontribusi pemerintah, serta menjaga keberlanjutan pemerintah secara jangka panjang.
4. Kecurangan Laporan Keuangan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengecoh dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan dengan menyajikan dan merekayasa nilai material dari laporan keuangan itu sendiri.

### 1.4.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu, biaya dan materi dalam melakukan penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Integritas Auditor, dalam mengukur integritas auditor banyak dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Dalam penelitian ini menggunakan indikator-indikator yaitu kejujuran, keberanian, sikap bijaksana dan tanggung jawab dari auditor.
2. Komitmen Organisasi sebagai gambaran dari bagaimana perilaku organisasi memiliki keterikatan kuat dengan lembaga atau organisasi dimana dia bekerja. Untuk mengetahui komitmen tersebut menggunakan indikator-indikator yaitu *affective commitment*, *continuance commitment*, dan *normative commitment*.
3. Penerapan *Good Corporate Governance* adalah suatu proses tata kelolaan yang baik, dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian sosial politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan.
4. Pencegahan Laporan Keuangan adalah suatu upaya untuk dapat mengurangi kemungkinan timbulnya kecurangan laporan keuangan. Upaya tersebut dalam penelitian ini menggunakan indikator menetapkan *tone at the top*, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan pelatihan.

5. Lingkup penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di 12 Kecamatan di Wilayah Kota Bekasi.

#### **1.4.3 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah integritas auditor berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah yang telah dijabarkan. Secara rinci, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisa seberapa besar pengaruh integritas auditor terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk menguji dan menganalisa seberapa besar pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisa seberapa besar pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Aspek Teoritis

#### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan menambah pengetahuan tentang pengaruh integritas auditor, komitmen organisasi dan penerapan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.

#### 2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi yang membutuhkan serta dapat menjadi landasan untuk penelitian dan karya ilmiah tentang pengaruh integritas auditor, komitmen organisasi dan penerapan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan.

#### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya.

### 2. Aspek Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk Organisasi Perangkat Daerah Wilayah Kota Bekasi dalam menerapkan

integritas auditor, komitmen organisasi, dan *good corporate governance* untuk meminimalisir perilaku *fraud* di lingkungan pemerintahan.

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dipahami pihak lain tentang pengaruh integritas auditor, komitmen organisasi dan penerapan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan.

